

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan dasar – dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan dan membangun kerangka penelitian. Selain itu, bab ini memuat dan mengkaji berbagai tinjauan pustaka serta penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan topik penelitian. Kajian tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan hubungan antarvariabel yang diteliti, sekaligus memperkuat dasar teoritis dan empiris penelitian.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam kenaikan output riil atau pendapatan nasional dalam jangka panjang. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kuantitas output, tetapi juga mencakup perubahan struktural, peningkatan produktivitas, serta perbaikan kualitas institusi (Todaro & Smith, 2015). Dalam perkembangan teori ekonomi, penjelasan mengenai sumber pertumbuhan berevolusi dari pendekatan berbasis faktor produksi menuju pendekatan yang memasukkan peran teknologi, inovasi, dan kebijakan. Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu klasik, neoklasik, dan pertumbuhan endogen.

2.1.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator yang menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara. Salah satu indikator yang paling umum digunakan adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil atau *Gross Domestic Product (GDP) Growth*. pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu yang tercermin dalam peningkatan output riil (Todaro & Smith, 2015).

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan indikator *GDP Growth (annual %)* yang bersumber dari *World Bank*. Indikator ini menunjukkan persentase perubahan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil suatu negara dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan *GDP Growth (annual %)* dinilai mampu menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi secara komprehensif karena memperhitungkan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi nilai *GDP Growth (annual %)*, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara. Sebaliknya, apabila nilai *GDP Growth* mengalami penurunan atau bernilai negatif, kondisi tersebut menunjukkan adanya perlambatan bahkan kontraksi ekonomi. Oleh karena itu, indikator *GDP Growth (annual %)* banyak digunakan dalam penelitian ekonomi untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja perekonomian suatu negara.

2.1.1.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas institusi, perkembangan teknologi, investasi, serta kebijakan pemerintah (Todaro & Smith, 2015). Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui penyediaan barang dan jasa publik, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program pembangunan yang meningkatkan produktivitas perekonomian. Dalam perspektif Keynesian, peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Faktor lainnya adalah *Foreign Direct Investment* (FDI). FDI berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan modal, transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Kehadiran investasi asing juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor ekonomi domestik sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kualitas institusi, khususnya *Control of Corruption*, juga menjadi faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Tingkat korupsi yang rendah akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperkuat kepercayaan investor, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Sebaliknya, tingginya korupsi dapat menghambat investasi dan menurunkan efektivitas kebijakan ekonomi.

Faktor lain yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah *Government Effectiveness* atau efektivitas pemerintahan. Pemerintahan yang efektif mampu menyediakan layanan publik yang berkualitas, merumuskan kebijakan yang tepat, serta mengimplementasikan program pembangunan secara efisien. Kondisi tersebut dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun kelembagaan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dianalisis meliputi pengeluaran pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), *Control of Corruption*, serta *Government Effectiveness*.

2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan klasik dikemukakan oleh Adam Smith yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pembagian kerja (*division of labor*), akumulasi modal, dan perluasan pasar (Smith, 2003). Pembagian kerja meningkatkan produktivitas melalui spesialisasi tenaga kerja, efisiensi waktu, dan penggunaan teknologi yang lebih efektif. Selain itu, akumulasi modal yang berasal dari tabungan akan meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan output (Smith, 2003).

Selanjutnya, David Ricardo mengembangkan teori klasik dengan menekankan adanya keterbatasan dalam pertumbuhan ekonomi akibat kelangkaan sumber daya, khususnya tanah (Ricardo, 1817). Ricardo memperkenalkan konsep *law of diminishing returns*, yaitu kondisi di mana penambahan input produksi akan menghasilkan

tambahan output yang semakin menurun (Ricardo, 1817). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan perekonomian mencapai keadaan stagnasi atau *stationary state* (Ricardo, 1817).

Selain itu, teori klasik juga menyoroti pentingnya distribusi pendapatan antara pemilik faktor produksi, yaitu tenaga kerja, kapitalis, dan pemilik tanah, dalam menentukan tingkat tabungan dan investasi (Ricardo, 1817). Distribusi pendapatan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi akumulasi modal dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun memberikan dasar awal yang kuat, teori klasik memiliki keterbatasan karena belum mampu menjelaskan secara eksplisit peran teknologi dan institusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Todaro & Smith, 2015).

2.1.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert Solow melalui model pertumbuhan Solow yang menekankan peran modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Solow, 1956). Dalam model ini, fungsi produksi agregat menggambarkan hubungan antara output dengan faktor produksi, di mana teknologi berperan sebagai faktor yang meningkatkan produktivitas (Solow, 1956).

Model Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dapat dicapai melalui akumulasi modal, namun dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai kondisi *steady state*, yaitu keadaan di mana pertumbuhan output per kapita menjadi konstan (Solow, 1956). Dalam kondisi ini, pertumbuhan

ekonomi jangka panjang hanya dapat ditentukan oleh kemajuan teknologi (Solow, 1956).

Salah satu implikasi penting dari teori neoklasik adalah konsep konvergensi, yaitu kecenderungan negara dengan tingkat pendapatan rendah untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan negara maju, sehingga kesenjangan ekonomi antar negara dapat menyempit (Barro, 1990). Namun, konsep ini berlaku dengan asumsi bahwa negara-negara tersebut memiliki karakteristik struktural yang serupa.

Meskipun memberikan kontribusi penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi, teori neoklasik memiliki kelemahan karena menganggap teknologi sebagai faktor eksogen yang tidak dijelaskan dalam model (Solow, 1956). Hal ini menyebabkan teori ini kurang mampu menjelaskan peran kebijakan pemerintah dan investasi dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2015).

2.1.1.6 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen dikembangkan oleh Paul Romer yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari faktor internal dalam perekonomian, seperti inovasi, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (Romer, 1986). Dalam teori ini, teknologi tidak lagi dianggap sebagai faktor eksogen, melainkan sebagai hasil dari aktivitas ekonomi yang disengaja (Romer, 1986).

Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah adanya *knowledge spillover*, yaitu penyebaran pengetahuan dari satu pelaku ekonomi ke pelaku lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan (Romer, 1986). Selain itu, investasi

dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga berperan dalam meningkatkan kapasitas inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Lucas, Robert E., 1988).

Teori pertumbuhan endogen juga menekankan pentingnya peran kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, serta regulasi yang mendukung investasi akan meningkatkan akumulasi modal manusia dan inovasi (Barro, 1990).

Dalam konteks globalisasi, teori ini relevan dalam menjelaskan peran *Foreign Direct Investment* (FDI) sebagai sarana transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang (Borensztein et al., 1998). Selain itu, kualitas institusi seperti pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintahan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi, karena institusi yang baik akan meningkatkan efisiensi dan mendorong investasi (North, 1990).

Dengan demikian, teori pertumbuhan endogen memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, karena mampu mengintegrasikan peran investasi, inovasi, kebijakan pemerintah, serta kualitas institusi dalam satu kesatuan analisis.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, menyediakan barang dan jasa publik, serta mendorong pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk

memengaruhi tingkat kegiatan ekonomi melalui berbagai program dan aktivitas yang dibiayai oleh anggaran negara (Sukirno, 2016).

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Pengeluaran pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian (Musgrave & Musgrave, 1989).

Dalam perekonomian modern, pengeluaran pemerintah menjadi salah satu komponen penting yang memengaruhi aktivitas ekonomi. Melalui berbagai program pembangunan, penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya, pemerintah dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.1.2.2 Fungsi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), pengeluaran pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta, seperti jalan raya, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
2. Fungsi Distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, subsidi, dan kebijakan fiskal lainnya.

3. Fungsi Stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi, pengangguran, maupun perlambatan ekonomi.

Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Jenis – Jenis Pengeluaran Pemerintah

Secara umum, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

1. Pengeluaran Rutin, yaitu pengeluaran yang dilakukan secara berkala untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan, seperti pembayaran gaji pegawai, belanja barang, pemeliharaan fasilitas publik, dan biaya administrasi pemerintahan.
2. Pengeluaran Pembangunan, yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan lainnya.

Pengeluaran pemerintah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran investasi pemerintah (Mankiw, 2016). Pengeluaran konsumsi pemerintah digunakan untuk penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan pengeluaran investasi pemerintah bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan pembangunan jangka panjang.

2.1.2.4 Indikator Pengeluaran Pemerintah (*General Government Final Consumption*) (% of GDP)

Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah diukur menggunakan indikator *General Government Final Consumption Expenditure (% of GDP)* yang bersumber dari *World Bank*. Indikator ini menunjukkan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah yang mencakup seluruh pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kompensasi pegawai, pembelian barang dan jasa, serta pengeluaran operasional pemerintah yang dinyatakan sebagai persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Penggunaan indikator *General Government Final Consumption Expenditure (% of GDP)* bertujuan untuk menggambarkan besarnya peran konsumsi pemerintah dalam aktivitas perekonomian suatu negara. Semakin tinggi proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB, maka semakin besar keterlibatan pemerintah dalam mendukung aktivitas ekonomi melalui penyediaan layanan publik dan pelaksanaan kebijakan fiskal.

Indikator ini banyak digunakan dalam penelitian ekonomi karena memungkinkan perbandingan antarnegara dengan ukuran ekonomi yang berbeda-beda. Dengan menggunakan rasio terhadap PDB, pengaruh relatif konsumsi pemerintah terhadap perekonomian dapat diamati secara lebih objektif.

2.1.2.5 Teori Keynesian (*Demand-Side Theory*)

Teori Keynesian atau *Demand-Side Theory* dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam karyanya *The General Theory of Employment, Interest and Money*

(1936). Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat (*aggregate demand*), yaitu total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Permintaan agregat terdiri atas konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto (X-M).

Menurut Keynes, perekonomian tidak selalu berada pada kondisi kesempatan kerja penuh (*full employment*). Dalam kondisi tertentu, rendahnya permintaan agregat dapat menyebabkan penurunan output, meningkatnya pengangguran, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal, salah satunya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga mendorong kenaikan produksi, pendapatan masyarakat, dan kesempatan kerja. Kondisi tersebut selanjutnya akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang dapat memperbesar dampak awal dari pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian.

Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah diproksikan menggunakan *General Government Final Consumption Expenditure (% of GDP)*. Berdasarkan teori Keynesian, peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan agregat, output nasional akan meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, teori Keynesian menjadi landasan teoritis yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat.

2.1.3 *Foreign Direct Investment* (FDI)

2.1.3.1 Pengertian FDI

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan investasi yang dilakukan oleh investor atau perusahaan asing di suatu negara dengan tujuan memperoleh kepemilikan dan pengendalian jangka panjang terhadap suatu perusahaan atau kegiatan usaha. FDI adalah investasi yang mencerminkan hubungan jangka panjang dan kepentingan berkelanjutan dari investor asing terhadap perusahaan yang berada di negara penerima investasi (UNCTAD, 2023).

FDI terjadi apabila investor asing memiliki paling sedikit 10 persen hak suara dalam suatu perusahaan di negara tujuan investasi. Kepemilikan tersebut menunjukkan adanya pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan (OECD, 2008).

FDI tidak hanya memberikan tambahan modal bagi negara penerima, tetapi juga membawa transfer teknologi, keterampilan manajerial, inovasi, serta akses pasar internasional yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.2 Jenis Jenis FDI

Menurut UNCTAD (2023), FDI dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Horizontal* FDI, yaitu investasi yang dilakukan perusahaan asing dengan menjalankan kegiatan usaha yang sama seperti di negara asalnya pada negara tujuan investasi.

2. *Vertical FDI*, yaitu investasi yang dilakukan untuk mendukung rantai produksi perusahaan, baik pada tahap penyediaan bahan baku maupun distribusi produk.
3. *Conglomerate FDI*, yaitu investasi yang dilakukan pada sektor usaha yang berbeda dengan kegiatan utama perusahaan di negara asal.
4. *Greenfield Investment*, yaitu investasi yang dilakukan dengan membangun fasilitas usaha baru dari awal di negara tujuan.
5. *Merger and Acquisition (M&A)*, yaitu investasi yang dilakukan melalui pembelian atau penggabungan perusahaan yang telah beroperasi di negara tujuan.

2.1.3.3 Teori Pertumbuhan Endogen

Secara teoritis, teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari faktor internal dalam perekonomian, terutama melalui investasi, inovasi, dan akumulasi pengetahuan (Romer, 1986). Berbeda dengan pendekatan neoklasik yang menganggap teknologi sebagai faktor eksternal, teori ini menempatkan teknologi sebagai hasil dari aktivitas ekonomi yang disengaja.

Dalam kerangka ini, investasi memiliki peran ganda, yaitu sebagai penambah kapasitas produksi dan sebagai pendorong peningkatan produktivitas. *Foreign Direct Investment (FDI)* menjadi salah satu bentuk investasi yang sangat penting karena membawa tidak hanya modal, tetapi juga teknologi, keterampilan manajerial, serta akses terhadap jaringan pasar global. Dengan masuknya teknologi yang lebih maju,

produktivitas faktor produksi domestik akan meningkat, sehingga output ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Mekanisme lain yang dijelaskan dalam teori ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui proses pembelajaran (*learning by doing*) dan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan asing. Hal ini akan meningkatkan kemampuan tenaga kerja domestik dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produksi.

Dengan demikian, secara teoritis, FDI berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan efisiensi dalam perekonomian.

2.1.3.4 Teori Spillover

Teori *spillover* menjelaskan bahwa keberadaan FDI tidak hanya memberikan dampak langsung melalui penambahan modal, tetapi juga memberikan dampak tidak langsung melalui transfer pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan domestik (Caves, 1996).

Mekanisme *spillover* terjadi melalui beberapa saluran. Pertama, melalui imitasi teknologi, di mana perusahaan domestik meniru metode produksi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan asing. Kedua, melalui mobilitas tenaga kerja, di mana tenaga kerja yang telah memperoleh pengalaman di perusahaan asing berpindah ke perusahaan domestik dan membawa pengetahuan serta keterampilan baru. Ketiga, melalui hubungan produksi, seperti kemitraan antara perusahaan asing dan lokal dalam rantai pasok, yang meningkatkan standar kualitas dan efisiensi produksi.

Namun, secara teoritis, besarnya efek *spillover* sangat bergantung pada kemampuan absorpsi (*absorptive capacity*) negara penerima. Negara yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, infrastruktur yang memadai, serta kebijakan yang mendukung akan lebih mampu memanfaatkan keberadaan FDI dibandingkan negara dengan kondisi sebaliknya.

Dengan demikian, teori *spillover* menegaskan bahwa FDI dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor domestik.

2.1.4 Control of Corruption

2.1.4.1 Pengertian Control of Corruption

Control of Corruption merupakan salah satu indikator dalam *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang dikembangkan oleh Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi. Indikator ini mengukur persepsi mengenai sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk korupsi dalam bentuk kecil maupun besar, serta penguasaan negara oleh kelompok elit dan kepentingan tertentu (Kaufmann et al., 2010).

Control of Corruption mencerminkan kemampuan suatu negara dalam mencegah dan mengendalikan praktik korupsi melalui penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tingkat pengendalian korupsi yang tinggi menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan sehingga aktivitas ekonomi berjalan lebih efisien.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pengendalian korupsi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi biaya transaksi, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.2 Indikator *Control of Corruption*

Dalam penelitian ini, *Control of Corruption* diukur menggunakan indikator *Control of Corruption Estimate* yang bersumber dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI) *World Bank*.

Nilai indikator ini berada pada rentang -2,5 hingga +2,5, di mana:

1. Nilai mendekati +2,5 menunjukkan tingkat pengendalian korupsi yang semakin baik.
2. Nilai mendekati -2,5 menunjukkan tingkat korupsi yang relatif tinggi dan lemahnya pengendalian korupsi.

Semakin tinggi nilai *Control of Corruption*, maka semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

2.1.4.3 Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Douglass North menjelaskan bahwa institusi merupakan faktor fundamental yang menentukan efisiensi dan kinerja ekonomi suatu negara (North, 1990). Institusi mencakup aturan formal seperti hukum dan kebijakan, serta aturan informal seperti norma dan budaya yang mengatur interaksi ekonomi.

Mekanisme utama dalam teori ini adalah bahwa institusi yang baik akan menciptakan kepastian hukum, menurunkan biaya transaksi, dan mengurangi ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, sehingga mendorong investasi dan aktivitas produksi. Sebaliknya, institusi yang lemah, yang ditandai dengan tingginya tingkat korupsi, akan menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya dan menurunkan efisiensi ekonomi.

Korupsi, secara teoritis, bertindak sebagai “biaya tambahan” dalam perekonomian yang menghambat investasi dan menurunkan produktivitas. Selain itu, korupsi juga dapat menyebabkan misalokasi sumber daya karena keputusan ekonomi tidak didasarkan pada efisiensi, melainkan pada kepentingan tertentu.

Dengan demikian, secara teoritis, pengendalian korupsi yang baik akan meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong investasi, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.5 Government Effectiveness

2.1.5.1 Pengertian *Government Effectiveness*

Government Effectiveness merupakan salah satu indikator dalam *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang mengukur kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, kompetensi aparatur pemerintah, independensi birokrasi dari tekanan politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan (Kaufmann et al., 2010).

Government Effectiveness mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

pembangunan. Pemerintahan yang efektif mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Semakin tinggi tingkat *Government Effectiveness*, semakin baik kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan mendukung aktivitas ekonomi.

2.1.5.2 Indikator *Government Effectiveness*

Dalam penelitian ini, *Government Effectiveness* diukur menggunakan indikator *Government Effectiveness Estimate* yang bersumber dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI) World Bank.

Nilai indikator *Government Effectiveness* berada pada rentang -2,5 hingga +2,5, di mana:

1. Nilai mendekati +2,5 menunjukkan kualitas pemerintahan yang semakin efektif.
2. Nilai mendekati -2,5 menunjukkan kualitas pemerintahan yang relatif rendah.

Indikator ini mencakup penilaian terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai *Government Effectiveness*, semakin efektif kinerja pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.3 Teori *Good Governance*

Konsep tata kelola pemerintahan (*good governance*) menekankan bahwa efektivitas pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja ekonomi. *Government Effectiveness* mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik, menjaga stabilitas kebijakan, serta mengelola sumber daya secara efisien (Kaufmann & Kraay, 2002).

Mekanisme utama dalam teori ini adalah bahwa pemerintahan yang efektif akan mampu mengurangi hambatan birokrasi, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, *Government Effectiveness* juga berperan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi lainnya. Pengeluaran pemerintah yang dikelola secara efektif akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. FDI akan lebih optimal dalam lingkungan dengan regulasi yang jelas dan birokrasi yang efisien. Selain itu, efektivitas pemerintahan juga memperkuat pengendalian korupsi melalui implementasi kebijakan yang konsisten.

Dengan demikian, secara teoritis, *Government Effectiveness* tidak hanya berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat hubungan antara variabel ekonomi lainnya dengan pertumbuhan ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel penelitian terdahulu disusun untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Investment*, *Control of Corruption* dan *Government Effectiveness*. Melalui tabel ini, dapat diketahui persamaan dan perbedaan fokus penelitian, variabel yang digunakan, serta temuan empiris yang mendukung perumusan penelitian ini. Penyajian penelitian terdahulu juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hanan, V., & Prastowo (2024). Analisis Pengaruh Kualitas Institusi dan FDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN	• FDI • <i>Control of Corruption</i>, • <i>Government Effectiveness</i> • Pertumbuhan Ekonomi.	• Pengeluaran Pemerintah • Tidak ada moderasi	FDI, <i>Control of Corruption</i> , dan <i>Government Effectiveness</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 3 Issue 2, 2024: 136-146, DOI: 10.20885/JKE K.vol3.iss2.art 3
2	Ardiana & Widanta (2025) – Pengaruh FDI, Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 3 Negara ASEAN	• FDI • Pengeluaran Pemerintah • Pertumbuhan Ekonomi	• Inflasi. • Objek penelitian 3 negara ASEAN. • Tidak ada moderasi	FDI, pengeluaran pemerintah, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis, 3(2), 357–372.
3	Sofira, Ambya, & Darmawan (2024) – Pengaruh FDI,	• FDI • Pengeluaran Pemerintah	• Variabel Tenaga Kerja. • Fokus pada faktor	FDI berpengaruh positif signifikan,	<i>Indonesian Journal of Economics Management</i>

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-5	• Pertumbuhan Ekonomi	• ekonomi makro. • Tidak ada moderasi	pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	<i>and Accounting (IJEMA)</i> , Vol. 1 No. 12, 2024. URL: https://jurnal.itekomp.id/index.php/ijema/article/view/921
4.	Addainuri et al. (2023) – Dampak <i>Governance</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	• <i>Control of Corruption</i> • <i>Government Effectiveness</i> • Pertumbuhan Ekonomi.	• FDI • Pengeluaran Pemerintah • Tidak ada moderasi	<i>Government Effectiveness dan Rule of Law</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Administratio, 14(1). URL: https://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id
5.	Ramadhan, M. (2019). <i>Assessing Of The Impact Of Good Governance And Institutions On Economic Growth In Indonesia</i>	• <i>Control of Corruption</i> • <i>Government Effectiveness</i> • Pertumbuhan Ekonomi	• Objek Penelitian Indonesia • Tidak ada moderasi	<i>Control of Corruption dan Government Effectiveness</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>International Journal of Scientific & Technology Research</i> , 8(11), 2594–2598. URL/Full Text tersedia di ResearchGate.
6.	Saputra, R. A., Susilowati, D., & Arifin, Z. (2021). Efektivitas Tenaga Kerja dan Investasi Asing dalam Pertumbuhan PDB Per Kapita Negara ASEAN	• FDI • Pertumbuhan Ekonomi	• Variabel Tenaga Kerja • Tidak ada moderasi	FDI dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), Vol. 5(1). DOI: https://doi.org/10.22219/jie.v5i1.13855
7.	Maransanti, A.T.P., & Verico, K. (2023). <i>Role of Socioeconomic Uncertainty on Foreign Direct</i>	• FDI • Pertumbuhan Ekonomi • ASEAN	• Menambahkan <i>socioeconomic uncertainty</i> • Fokus pada arus masuk FDI.	FDI berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Journal of ASEAN Studies, Vol. 11(2), 367–389. DOI: https://doi.org/

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Investment (FDI) Inflows and Economic Growth in ASEAN</i>		• Tidak ada moderasi		10.21512/jas.v11i2.8766
8.	Kharisma, B., et al. (2024). <i>FDI, Institutional Quality and Economic Growth in ASEAN</i>	• FDI • Pertumbuhan Ekonomi	• Fokus pada hubungan institusi • Tidak ada moderasi	FDI dan kualitas institusi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Ekonomi Pembangunan, 26(1). DOI: https://doi.org/10.23917/jep.v26i1.8822
9.	Basri (2024) – <i>Government Effectiveness and Economic Growth: Empirical Evidence from ASEAN</i>	• FDI • <i>Government Effectiveness</i> • Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran pemerintah dan <i>Control of Corruption</i>	<i>Government Effectiveness</i> berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN dan berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antar variabel, serta menunjukkan pengaruh signifikan dalam model tertentu	Jurnal Al-Istishna, Vol. 1(2), 2025. DOI: https://doi.org/10.58326/jai.v1i2.297
10.	Sari, W. P., & Choiri, M. (2024). <i>Trade Openness, FDI and Economic Growth in ASEAN</i>	• FDI • Pertumbuhan Ekonomi	• Menambahkan <i>trade openness</i>. • Fokus pada integrasi perdagangan internasional. • Tidak ada moderasi	FDI berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Ekonomi Pembangunan, 23(1). DOI: https://doi.org/10.22219/jep.v23i01.40837
11.	Lestari, A., et al. (2023). <i>FDI and Economic Growth in ASEAN</i>	• FDI • Pertumbuhan Ekonomi	• Mengkaji pengaruh jangka pendek dan jangka panjang • Tidak ada moderasi	FDI berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan panjang	Jurnal Ekonomi Pembangunan, 22(2). DOI: https://doi.org/10.22219/jep.v22i02.34279

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Suparta, I. W., & Renaldi, I. M. (2024). <i>FDI, Economic Complexity and Growth in ASEAN</i>	• FDI • Pertumbuhan Ekonomi	• Menambahk an <i>economic complexity</i> • Fokus pada struktur ekonomi negara ASEAN. • Tidak ada moderasi	FDI berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN	Jurnal Ekonomika dan Bisnis, 5(5). DOI: https://doi.org/10.47233/jebbs.v5i5.3669
13.	Jama, Daud, & Nayan (2024) – The <i>Relationship Between Government Expenditure and Economic Growth in ASEAN-5 Countries</i>	• Pengeluaran Pemerintah • Pertumbuhan Ekonomi	• FDI • <i>Control of Corruption</i> • <i>Government Effectiveness</i> • Tidak ada moderasi	Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang di ASEAN-5	Journal of Infrastructure, Policy and Development, Vol. 8(7). DOI: https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4329
14.	Tazkia (2025) – <i>Reassessing the Political Economy of Growth in ASEAN: The Interplay of Political Stability, Government Effectiveness, and Inflation</i>	• <i>Government Effectiveness</i> • Pertumbuhan ekonomi	• <i>Political Stability</i> • Inflasi • Tidak ada moderasi	<i>Government Effectiveness</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN, sementara <i>Political Stability</i> berpengaruh negatif signifikan dan <i>Inflation</i> negatif tetapi tidak signifikan. GE juga menjadi jalur utama pengaruh stabilitas politik terhadap	Bisnis Ekonomi Politik* (<i>Journal of Political Economy and Business</i>), INDEF (<i>Indonesian Institute for Economics and Politics</i>) Vol. 1 No. 2 (2025), Article 265, DOI: 10.46851/265

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pertumbuhan ekonomi	
15.	Prasetyani, D., Cahyadin, M., Wei, Y. S., & Rosalia, A. C. T. (2023). <i>Do Corruption and Institutions Contribute to the Economic Growth in ASEAN Countries During 2000–2018.</i>	• <i>Control of Corruption, Government Effectiveness</i> • Pertumbuhan Ekonomi	• Fokus pada pengaruh korupsi dan kualitas institusi terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN periode 2000–2018 serta • Tidak ada moderasi	<i>Control of Corruption</i> dan beberapa indikator institusi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN.	Jurnal Ekonomi Pembangunan : Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan ISSN (Online): 2460-9331 ISSN (Print): 1411-6081
16.	Raharja, J., Purnomo, E. P., & Mutiarin, D. (2023). <i>Does E-Government and Control of Corruption Affect Government Effectiveness and Economic Growth in Lower-Middle-Income Countries in Asia?</i>	• <i>Control of Corruption</i> • <i>Government Effectiveness</i> • Pertumbuhan Ekonomi	• Objek penelitian negara berpendapatan menengah ke bawah di Asia, bukan ASEAN-8 • Tidak ada moderasi	<i>Control of Corruption</i> berpengaruh terhadap <i>Government Effectiveness</i> dan <i>Government Effectiveness</i> berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Sosioteknologi, 22(3). DOI: https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2023.22.3.4
17.	Rozi, A. F. (2024). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN	• <i>Government Effectiveness</i> • <i>Control of Corruption</i> • Pertumbuhan Ekonomi	• Fokus pada indikator tata kelola pemerintahan tanpa memasukkan FDI dan Pengeluaran Pemerintah • Tidak ada moderasi	<i>Government Effectiveness</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN.	<i>Sunan Kalijaga: Islamic Economics Journal</i> (SKI EJ), Vol. 2 No. 2 (2023), DOI: 10.14421/skiej.2023.2.2.2114

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Apriani, R., Bashir, A., & Subardin, M. (2025). <i>The Impact of Corruption and Fiscal Policy on Economic Growth in ASEAN Countries</i>	• Pengeluaran Pemerintah • FDI • Pertumbuhan Ekonomi	• Fokus pada korupsi dan kebijakan fiskal • Tidak ada moderasi	Pengeluaran pemerintah dan FDI berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 17 No. 1 (2025), Article 7
19.	Asnawi, Hasyim, Anwar, & Roni (2023). <i>The Effect of Foreign Debt, Foreign Investment (FDI), and Government Spending on Economic Growth in 5 ASEAN Countries</i>	• FDI • Pengeluaran Pemerintah • Pertumbuhan Ekonomi	• Menambahkan variabel utang luar negeri • Menggunakan ASEAN-5 • Tidak ada moderasi	FDI tidak berpengaruh signifikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN-5.	JOMPE* (Jurnal Mahasiswa Ekonomi), Universitas Malikussaleh (UNIMAL), Indonesia, Vol. 7 No. 1 (2023)
20.	Anwar, A. (2023). <i>International Trade and Economic Growth in ASEAN</i>	• FDI • Pertumbuhan Ekonomi	• Perdagangan Internasional • Tidak ada moderasi	FDI dan perdagangan memengaruhi pertumbuhan ekonomi	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, 3(1). DOI: https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss1.art14

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen, variabel dependen, serta variabel moderasi yang digunakan. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan *Control of Corruption*, sedangkan variabel dependen adalah Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan *Government Effectiveness* sebagai variabel moderasi.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan fiskal, investasi, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Pengeluaran pemerintah berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, sedangkan FDI menjadi sumber pembiayaan eksternal yang dapat meningkatkan kapasitas produksi. Di sisi lain, *Control of Corruption* mencerminkan kualitas institusi yang berpengaruh terhadap efisiensi ekonomi.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, menurut peneliti, perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan kualitas tata kelola pemerintahan di masing-masing negara.

Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa *Government Effectiveness* memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan ekonomi. Pemerintahan yang efektif cenderung mampu mengelola pengeluaran secara optimal, memaksimalkan manfaat investasi asing, serta mengurangi dampak negatif dari praktik korupsi.

Dengan demikian, peneliti menduga bahwa *Government Effectiveness* tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, FDI, dan *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-8.

2.3.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara teoritis, hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi dijelaskan melalui Teori Keynesian (*Demand-Side Theory*) yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Teori ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen permintaan agregat yang berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat, yang selanjutnya mendorong peningkatan output nasional, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat. Melalui mekanisme multiplier effect, peningkatan output tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, berdasarkan Teori Keynesian, pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai.

2.3.2 Hubungan *Foreign Direct Investment* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Foreign Direct Investment (FDI) secara teoritis memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi melalui dua pendekatan utama, yaitu teori pertumbuhan neoklasik dan teori pertumbuhan endogen. Dalam teori neoklasik, FDI dipandang

sebagai tambahan stok modal dalam suatu perekonomian. Masuknya investasi asing akan meningkatkan ketersediaan modal untuk kegiatan produksi sehingga kapasitas produksi nasional meningkat. Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan mendorong kenaikan output nasional yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, dalam teori pertumbuhan endogen, FDI tidak hanya berperan sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai sarana transfer teknologi, pengetahuan, inovasi, dan keterampilan manajerial. Teknologi dan pengetahuan yang dibawa oleh investor asing dapat menyebar ke perusahaan domestik melalui *spillover effect* sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas faktor produksi. Peningkatan produktivitas tersebut kemudian mendorong peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Romer, 1990).

Selain meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas, FDI juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas aktivitas ekonomi. Dengan demikian, mekanisme hubungan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi terjadi melalui peningkatan modal, transfer teknologi, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan output nasional yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2015).

Secara empiris, hubungan positif antara FDI dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibuktikan. FDI berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN melalui peningkatan investasi dan produktivitas (Kharisma et al., 2025). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi arus FDI yang

masuk ke suatu negara, maka semakin besar peluang peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai.

2.3.3 Hubungan *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara teoritis, hubungan antara *Control of Corruption* dan Pertumbuhan Ekonomi dijelaskan dalam perspektif teori kelembagaan (*institutional theory*) yang menekankan bahwa kualitas institusi menentukan efisiensi aktivitas ekonomi. Institusi yang baik mampu menciptakan aturan main yang jelas dan menurunkan biaya transaksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (North, 1990). Dalam konteks ini, tingkat korupsi yang rendah mencerminkan kualitas tata kelola yang baik dan mendukung efisiensi alokasi sumber daya.

Korupsi yang tinggi dapat menyebabkan distorsi dalam perekonomian, seperti penyalahgunaan anggaran publik, ketidakefisienan dalam proyek pemerintah, serta meningkatnya biaya investasi. Kondisi ini pada akhirnya akan menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pengendalian korupsi yang efektif akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan investor, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Secara empiris, penelitian menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi dan efisiensi ekonomi (Mauro, 1995). Selain itu, indikator tata kelola, termasuk *Control of Corruption*, memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja ekonomi suatu negara (Kaufmann et al., 2010).

Dengan demikian, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa *Control of Corruption* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana semakin baik pengendalian korupsi, maka semakin besar potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2.3.4 Peran *Government Effectiveness* sebagai Variabel Moderasi

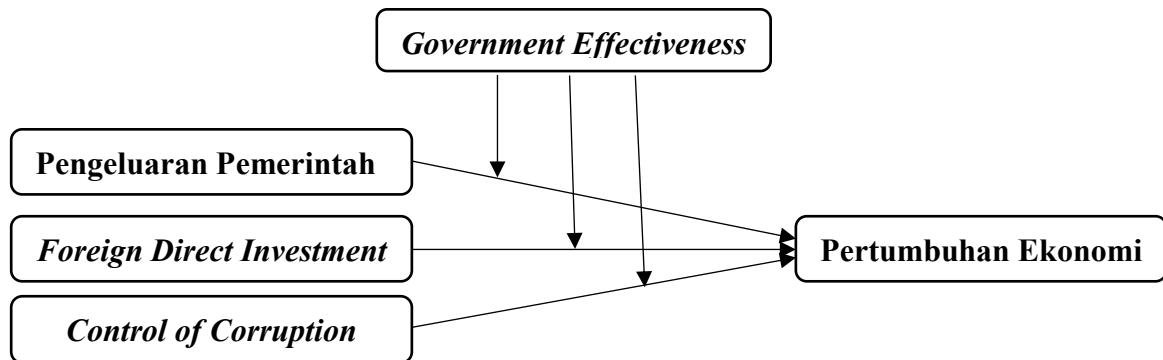
Secara teoritis, *Government Effectiveness* merupakan salah satu indikator kualitas tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif. Efektivitas pemerintahan berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, kompetensi birokrasi, serta kredibilitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah (Kaufmann et al., 2010). Dalam perspektif teori kelembagaan, kualitas pemerintahan yang baik akan meningkatkan efisiensi kebijakan ekonomi dan memperkuat hubungan antara variabel ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini, *Government Effectiveness* diposisikan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Semakin tinggi *Government Effectiveness*, maka pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan semakin kuat karena pemerintah mampu mengalokasikan dan mengelola pengeluaran secara lebih efektif dan produktif. Selain itu, *Government Effectiveness* juga diperkirakan memperkuat pengaruh FDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui terciptanya iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan birokrasi yang efisien. Di sisi lain, *Government*

Effectiveness diperkirakan memperkuat pengaruh *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena pemerintahan yang efektif mampu mengimplementasikan kebijakan antikorupsi secara lebih konsisten, transparan, dan akuntabel.

Secara empiris, kualitas institusi terbukti memiliki peran penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Acemoglu et al., 2019). Selain itu, institusi yang baik mampu meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta memperkuat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi (Rodrik et al., 2004). Dengan demikian, *Government Effectiveness* tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel ekonomi lainnya dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga layak digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini disajikan melalui kerangka pemikiran yang menggambarkan pengaruh Pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Invesrment*, dan *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta peran *Government Effectiveness* sebagai variabel moderasi. Kerangka pemikiran tersebut disusun untuk memperjelas alur hubungan antarvariabel yang dianalisis dalam penelitian ini.



Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Diolah oleh penulis

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang diajukan sebagai respons terhadap pertanyaan penelitian. Secara konseptual, hipotesis dipandang sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya masih memerlukan verifikasi melalui data empiris (Sugiyono, 2023: 86).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta peran *Government Effectiveness* sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan *Control of Corruption* mendorong Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-8 selama periode 2020 – 2024, serta menilai sejauh mana *Government Effectiveness* mampu memperkuat atau

memperlemah pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-8 selama periode 2020–2024.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengaruh langsung masing-masing variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melihat bagaimana kualitas efektivitas pemerintahan dapat memengaruhi kekuatan hubungan tersebut dalam konteks tata kelola ekonomi di ASEAN-8.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut.

- 1: Diduga Pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), *Control of Corruption* berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-8.
- 2: Diduga *Government Effectiveness* dapat memoderasi pengaruh Pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Investment*, dan *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-8.